

# Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara

YULVIANI IRENE SAMPUL  
FEMMY M.G TULUSAN  
VERY Y. LONDA

*The purpose of this research is to know the implementation process of economic empowerment program of coastal community in Belang Subdistrict of South Minahasa Regency. This is due to poorly targeted aid, poor quality of beneficiary community resources, misuse of relief goods, and lack of cooperation between the Office of Marine and Fisheries with the District Government. To be able to describe the implementation of economic empowerment program of coastal community in District Belang Regency of South Minahasa, researcher use descriptive qualitative research method. Data obtained through primary and secondary data sources with interviewing, obserfasi and document review techniques. Data analysis is done by data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that this program is quite helpful in improving the economy of the community but in its implementation is still found that the distribution of aid that is not on target and with limited human resources of the beneficiary fishermen groups resulted in the misuse of relief goods. Recommendations that can be put forward are by tightening the data collection of fishermen groups, providing maximum assistance to each group and making a statement not to abuse the relief items received.*

*Keywords: Policy Implementation, Economic Empowerment, Coastal Communities.*

## PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2007 pemerintah dibawah koordinasi kementerian koordinator Kesejahteraan Rakyat telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program PEMP di Kabupaten Minahasa Tenggara pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009. Program ini sebagai suatu program yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam program penangkapan dan pengolahan hasil perikanan, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan dalam bentuk perahu pelang(kapal 3GT), rakit/rumpon, perahu mesin tempel, peralatan pengolahan, dan pelatihan permesinan.

Ada beberapa masalah yang penulis temui dilapangan yang berkaitan dengan proses

implementasi program PEMP diantaranya, bantuan yang diberikan kurang tepat sasaran dengan adanya penyaluran bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tetapi masih didapati bantuan tersebut tersalurkan kepada masyarakat petani, kemudian masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki kelompok penerima bantuankarena masyarakat nelayan rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. Akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, membuat mereka tidak berpikir untuk maju malahan ketika mereka kehabisan dana operasional, mereka tidak berpikir panjang dan memutuskan untuk menjual barang bantuan pemerintah yang mereka terima. Masalah berikutnya kurangnya kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kecamatan Belang dimana pada saat penyerahan barang bantuan, Dinas Kelautan dan perikanan tidak menghadirkan pemerintah kecamatan sehingga pemerintah kecamatan Belang tidak menyaksikan secara langsung terlaksananya acara penyerahan barang bantuan tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama dengan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2005) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- a. Standar dan sasaran kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- b. Sumberdaya  
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- c. Hubungan antar organisasi  
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik organisasi pelaksana  
Dalam karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Disposisi implementor  
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
- f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik  
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Widjaja (2003:169) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Sony Kristianto pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

### **Definisi Masyarakat Pesisir**

masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah antara pertemuan laut dengan darat, baik kering maupun terendam yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

### **Konsep Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Menurut Kamus Besar Bahasa pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Karena itu maka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat adalah suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan atau status sosial ekonomi yang lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian (Nasution, 2001).

### **Fokus Penelitian**

Berdasarkan variabel implementasi kebijakan, focus penelitian ini memiliki dimensi yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan

- b. Sumberdaya
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik organisasi pelaksana
- e. Disposisi implementor
- f. Kondisi sosial ekonomi politik

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara di Desa :

- a. Mangkit
- b. Ponosakan
- c. Buku Tenggara
- d. Buku tengah
- e. Molompar Timur
- f. Watulinei Indah

### **Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini diantaranya 12 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah penelitian sendiri, sedangkan metode/teknik pengumpulan datanya adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penelaahan dokumen.

### **Teknik Analisis Data**

- a. Pengumpulan data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Reduksi data; ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penyajian data; Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.

- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan kegiatan pemberian bantuan untuk masyarakat yang tergabung dalam kelompok nelayan yang layak menerima bantuan pemerintah. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk : (1) mengembangkan potensi nelayan dalam melakukan pekerjaan; (2) Pemenuhan kebutuhan sarana untuk menjalankan aktifitas kerja sebagai seorang nelayan. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini yaitu : (1) memenuhi kebutuhan hidup keluarga; (2) memberikan kesempatan kepada nelayan untuk meningkatkan taraf hidup serta perekonomian keluarga. Sasaran dari program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah masyarakat kurang mampu yang tergabung dalam kelompok nelayan dan mempunyai kartu nelayan. Sedangkan bentuk kegiatannya adalah memberikan bantuan dalam bentuk barang seperti pelang (perahu) , mesin katiting, perahu lampu.

Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tersebut yang diamati meliputi “proses implementasi” dan “hasil implementasi”. Yang dimaksud dengan “proses implementasi adalah rangkaian aktivitas pelaksanaan program/kegiatan penyaluran bantuan untuk kelompok nelayan. Hal-hal yang dilihat pada proses pelaksanaan ini antara lain adalah pembentukan kelompok nelayan, pembuatan dan pengajuan proposal di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, skema penyaluran bantuan untuk kelompok nelayan yang sudah lulus berkas. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil implementasi” adalah hasil dan dampak pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir dalam meningkatkan potensi nelayan serta adanya peningkatan taraf hidup dan kondisi ekonomi keluarga. Hal-hal yang dilihat pada hasil implementasi ini antara lain adalah tingkatan kelancaran kegiatan setiap kelompok nelayan, manfaat yang diperoleh nelayan dari adanya program/kegiatan penyaluran bantuan, dampak pelaksanaan program/ kegiatan penyaluran bantuan terhadap peningkatan potensi dan kemampuan nelayan dalam memperbaiki/meningkatkan taraf hidup dan kondisi ekonomi keluarga.

Hasil wawancara dengan para informan tentang Proses Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui kegiatan penyaluran bantuan peralatan penangkapan untuk kelompok masyarakat nelayan di atas dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir masih belum sepenuhnya berhasil karena pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang dalam penyaluran bantuan pemerintah masih ada yang tidak tepat sasaran dalam hal ini ada kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani tapi mendapatkan bantuan alat penangkapan ikan sedangkan yang berprofesi sebagai nelayan yang juga tergolong masyarakat kurang mampu dan layak menerima bantuan justru tidak tergabung dalam kelompok penerima bantuan tersebut. Program ini juga bisa dikatakan belum bisa memberikan jaminan dalam keberhasilan pencapaian tujuan karena masih ada kelompok masyarakat penerima bantuan pemerintah yang menyalahgunakan barang bantuan dengan menjual barang tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi.
2. Dari segi sumber daya, implementor memiliki sumber daya manusia yang baik dalam mengatur dan menjalankan program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir di Kecamatan Belang dengan menjalankan setiap tahap program tersebut dengan baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan namun, masyarakat penerima bantuan memiliki sumber daya manusia yang lemah karena rata-rata masyarakat nelayan hanya lulusan sekolah dasar yang membatasi mereka untuk berpikir maju dalam setiap aspek kehidupan. Sumber daya finansial seperti dana atau insentif bisa memenuhi setiap anggaran program yang telah disusun dan ditetapkan sehingga dana yang ditetapkan dari pusat dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

3. Hubungan antar organisasi dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara cukup baik. Dengan adanya koordinasi antara dinas-dinas terkait dengan kelompok masyarakat melalui pendampingan di setiap desa, dan adanya kerjasama dalam berjalannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir membuat program tersebut berjalan dengan baik. Namun dalam proses implementasinya, dari sisi hubungan antar organisasi masih belum sepenuhnya berhasil karena dalam menjalankan program tersebut penyaluran bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan langsung direalisasikan pada kelompok masyarakat nelayan tanpa disaksikan secara langsung oleh Pemerintah Kecamatan pada saat penyerahan barang bantuan secara simbolis. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan organisasi Dinas terkait dengan Pemerintah Kecamatan kurang baik sehingga menyebabkan pemerintah kecamatan tidak mengetahui secara jelas mengenai implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang, sesuai dengan standar operating prosedur (SOP) proses pelaksanaan program tersebut sesuai dengan ketepatan waktu yang telah ditetapkan. Proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dilaksanakan oleh para implementor yang mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan program tersebut. Dalam fragmentasi, penyebaran tanggungjawab telah terlaksana dengan baik. Tanggung jawab yang diberikan kepada setiap organisasi yang bersangkutan telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Disposisi. Sikap implementor dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang masih menunjukkan adanya pengaruh besar terhadap kepentingan kelompok dan pribadinya yang membuat implementor tersebut melakukan program ini tanpa melihat tujuan awal dari program tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat dengan cara membantu masyarakat yang kurang berdaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui program bantuan pemerintah tersebut.
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat berdampak dalam pengimplementasian program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Belang, masyarakat turut mendukung setiap program yang telah ditetapkan pemerintah dan berpartisipasi dalam keberhasilan setiap program yang diimplementasikan. Dalam hal ini, masyarakat turut merasakan imbasnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya masing-masing dan bisa meningkatkan taraf hidup.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang sebagaimana telah dideskripsikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara belum berhasil karena program ini belum tepat sasaran dan adanya penyalahgunaan barang bantuan.
2. Pemerintah pelaksana program mempunyai sumber daya manusia yang baik namun sumber daya manusia dari kelompok masyarakat penerima bantuan sangat terbatas dalam pengimplementasian program tersebut. Sumber daya finansial yang cukup pun turut mendorong keberhasilan implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Ada koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Masyarakat nelayan calon penerima bantuan melalui sosialisasi dan pendampingan dari dinas tersebut selama proses implementasi yang dilakukan, namun dalam proses penyerahan barang bantuan, dinas tersebut belum sempat menghadirkan Pemerintah Kecamatan terkait sehingga pemerintah kecamatan tidak meyakinkan secara langsung proses penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat nelayan.
4. Karakteristik organisasi pelaksana dapat dikatakan baik karena adanya kerjasama antara individu pelaksana kebijakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik ternyata berdampak dalam keberhasilan program ini karena dalam kondisi sosial, masyarakat mendukung setiap program pemerintah dan program tersebut dapat meningkatkan potensi dan semangat mereka dalam memperbaiki perekonomian dan taraf hidup keluarga. Hal tersebut mendorong mereka untuk memberikan dukungan politik kepada pemerintah.
6. Disposisi implementor menunjukkan sikap yang baik karena implementor tersebut mempunyai komitmen untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Saran

Bertolak dari hasil penelitian ini maka dapatlah dikemukakan saran kepada para pengambil kebijakan ataupun pihak-pihak terkait dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yaitu sebagai berikut :

1. Memperketat pendataan kelompok nelayan yang menjadi calon penerima bantuan dan meningkatkan pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelompok penerima bantuan dengan memberikan pendampingan yang efektif dalam proses berjalannya program dan meningkatkan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan program yang lebih berkualitas.
3. Komunikasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan pemerintah kecamatan harus lebih di efektifkan.
4. Pendampingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan harus secara terus-menerus kepada masyarakat penerima bantuan.
5. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir perlu dilanjutkan untuk membantu meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto. S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bungin. B. 2010. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hikmat. H. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hutomo M.Y. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Bidang Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamasy. O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika.
- Kartasasmita. G. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya*. Bandung: Humaniora.
- Kristianto. S. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>>2013/12
- Kusmanto. T. 2002. *Reposisi "Ocean Polici" Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah*. Bandung: IPB Press.
- Kusnadi. 2009. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Laili. N. N. 2011. *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Bagi Nelayan Pantai Prigi Trenggalek*. *Jurnal Universitas Negeri Malang* 2, (1): 95-119. <http://ejournal.um.ac.id>
- Moleong. L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2001. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Purwanto A. E dan Sulistyastuti D. R 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardjo. A. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Razak. M. 2009. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, (1): 1-124. <http://ejournal.unisba.ac.id>

Singarimbun. M dan Effendi. S. 1995, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES

Slamet. M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Jakarta: Bina Aksara.

Soekanto. S. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo.

Solichin. A. W. 2005. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto. E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama

Suhendra. K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Solo: Gava Media.

Sumodiningrat. G. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syani A. 2002. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara

Tangkilisan. H. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset

Winarno. B. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Zamzami. L. 2011. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak Sumatra Barat. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 27, (1): 113-125. <http://media.neliti.com>

#### SUMBER LAIN :

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP.10/MEN/2002 Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 22/MEN/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan.

[BPS] Badan Pusat Statistik, Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Angka 2017. Minahasa Tenggara: BPS Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara.